

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR : 153/PMK.03/2009
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 187/PMK.03/2008 TENTANG TATACARA PEMOTONGAN, PENYETORAN, PELAPORAN, DAN PENATAUSAHAAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI

"KOP SURAT"

Nomor :
Lampiran :
Hal : Perubahan bukti pemotongan PPh yang bersifat final

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Jl.
di

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PMK.03/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, dan Penatausahaan Pajak Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi, maka bersama ini kami :
Wajib Pajak :
NPWP :
Alamat :

mengajukan permohonan untuk melakukan perubahan bukti pemotongan PPh yang bersifat final menjadi bukti pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa konstruksi atas bukti potong :

No	Bukti potong			Identitas Pemotong Pajak		
	Nomor	Jumlah Nilai Bruto	PPh yang dipotong	Nama	NPWP	Alamat
1.						
2.						
...						
JUMLAH						

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan.

.....
Cap dan Tanda Tangan

Direktur/Pengurus
NPWP:

- Lampiran:
- 1. Dua lembar fotokopi bukti pemotongan Pajak;
 - 2. Dokumen pendukung :
 - fotokopi kontrak dan dokumen pembayaran; atau
 - fotokopi kontrak, dokumen pembayaran, dan berita acara serah terima penyelesaian pekerjaan. *)

*) Coret salah satu yang tidak perlu

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Departemen

ttd.

Antonius Suharto
NIP 060041107

MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR : 153/PMK.03/2009
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 187/PMK.03/2008 TENTANG TATACARA PEMOTONGAN, PENYETORAN, PELAPORAN, DAN PENATAUSAHAAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH.....

Jalan.....
Kota.....
Kotak Pos

Telepon
Fak
Website www.pajak.go.id

Nomor : S-
Perihal : Penolakan perubahan bukti pemotongan PPh yang bersifat final

Yth.
Jl.
di

Berdasarkan permohonan Saudara Nomor tanggal perihal perubahan bukti pemotongan PPh yang bersifat final, dengan ini diberitahukan bahwa atas bukti pemotongan :

No	Bukti potong			Identitas Pemotong Pajak		
	Nomor	Jumlah Nilai Bruto	PPh yang dipotong	Nama	NPWP	Alamat
1.						
2.						
...						
JUMLAH						

tidak dapat diubah menjadi bukti pemotongan PPh Pasal 23 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: /PMK.03/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, dan Penatausahaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi, karena:

.....
.....

Demikian untuk dimaklumi.

.....
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
.....

.....
NIP

Tembusan Yth:
Kepala Kantor Wilayah

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Departemen

ttd.

Antonius Suharto
NIP 060041107

MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

